

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR

A. Landasan Filosofis

Filsafat pendidikan merupakan dasar konseptual yang menuntun arah dan praktik pendidikan, termasuk dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Penelitian ini berpijak pada aliran filsafat progresivisme, yaitu suatu pandangan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Progresivisme menolak pendekatan pendidikan tradisional yang kaku dan berorientasi pada hafalan, serta menekankan pentingnya pengalaman belajar yang kontekstual, aktif, dan bermakna. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai bekal menghadapi dinamika kehidupan sosial yang terus berubah.

Filsafat progresivisme lahir sebagai respons terhadap sistem pendidikan klasik yang terlalu menekankan transfer pengetahuan dari guru ke murid secara satu arah. Salah satu tokoh utama dalam filsafat ini adalah John Dewey, seorang filsuf dan pendidik asal Amerika Serikat. Menurut Dewey (1938), pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman secara berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa “education is not preparation for life; education is life itself.” Dalam pandangannya, belajar bukanlah aktivitas pasif, melainkan suatu proses aktif yang terjadi ketika peserta didik berinteraksi dengan lingkungan melalui pengalaman nyata. Dewey mengusulkan bahwa pembelajaran seharusnya dilakukan dalam konteks dunia nyata dan sesuai dengan minat serta kebutuhan peserta didik.

Selain John Dewey, tokoh lain seperti William H. Kilpatrick turut mengembangkan metode *project-based learning*, yang menekankan pentingnya proyek atau kegiatan nyata sebagai wahana pembelajaran. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mendalam melalui eksplorasi topik yang bermakna. Gagasan ini kemudian berkembang

menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Kurikulum Merdeka merupakan inovasi dalam kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberi kebebasan belajar kepada peserta didik dan otonomi kepada guru dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka, seperti diferensiasi pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, dan penekanan pada karakter, sangat sejalan dengan prinsip-prinsip progresivisme. Oleh karena itu, filsafat progresivisme memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam mengkaji manajemen Kurikulum Merdeka, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja guru sebagai pelaksana utama kurikulum di tingkat satuan pendidikan dasar.

Dalam perspektif progresivisme, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sekadar penyampai materi. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang menantang, relevan, dan berpusat pada siswa. Hal ini menuntut peningkatan kompetensi guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang kreatif dan reflektif. Oleh karena itu, manajemen kurikulum yang efektif menjadi sangat penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam semangat Kurikulum Merdeka.

Pemikiran progresivisme dalam konteks Indonesia dapat dijumpai dalam gagasan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan manusia dari keterbelakangan, penindasan, dan kebodohan. Dalam falsafah pendidikannya, beliau menekankan pendekatan humanistik yang menghargai kodrat anak, lingkungan budaya, dan peran aktif keluarga serta masyarakat dalam mendidik anak. Salah satu prinsip terkenalnya adalah: *“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”*, yang menggambarkan peran guru sebagai teladan, motivator, dan pemberi dorongan. Gagasan ini sejalan dengan peran guru dalam Kurikulum Merdeka yang diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran yang kontekstual dan berakar pada kehidupan nyata siswa.

Ki Hajar juga memperkenalkan konsep Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat) dan Trikon (kontinuitas, konvergensi, konsentris), yang menjadi cikal bakal dari pendidikan yang menyatu dengan budaya lokal dan tetap terbuka pada nilai-nilai global. Pemikiran ini selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang inovasi dan kontekstualisasi pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, termasuk dalam pelibatan masyarakat dan budaya setempat dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat progresivisme merupakan landasan filosofis yang relevan dan kuat untuk penelitian ini. Manajemen Kurikulum Merdeka yang efektif mensyaratkan adanya pemahaman filosofis yang mendalam tentang pembelajaran yang memerdekakan. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sistem manajemen kurikulum yang terarah, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan.

B. Landasan Sistem Nilai

Permasalahan kebudayaan sebagai akibat dari pengaruh globalisasi telah mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang tinggal diperkotaan. Proses globalisasi kebudayaan itu bagaikan udara, bila menghindar berarti tidak bisa bernapas. Oleh karena itu harus menghadapi kehidupan yang majemuk ini. Sanusi (2017) sangat memperhatikan akan kehidupan yang sangat kompleks ini, sehingga dengan kebijaksanaan dan keprofesionalannya beliau memberikan ilmu yang sangat berharga kepada mahasiswanya untuk menghadapi kehidupan yang sangat kompleks ini yaitu dengan memahami enam sistem kehidupan dalam pandangan Islam.

Kehidupan semakin kompleks karena adanya proses penyebaran dan pertukaran nilai-nilai budaya, ide, kebiasaan, kebudayaan, serta praktik-praktik sosial antara negara atau masyarakat yang berbeda, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan media massa, proses itu disebut globalisasi budaya. Namun kebudayaan semakin maju

mengglobal ternyata sangat berdampak terhadap aspek moral (Tafsir Ahmad 2002:1).

Sanusi (2017:34) menyatakan, “Berfikir sistem bukan sekedar mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan nilai, melainkan bagaimana nilai terwujud dalam kehidupan manusia dan menjadi acuan sekaligus pedoman tindakan manusia.” Lebih lanjut Sanusi (2017:51) menyampaikan, “Untuk mewujudkan enam sistem nilai maka harus memiliki komitmen untuk membangun hidup yang bernilai. Enam sistem nilai tersebut adalah teologik, nilai fisiologi, nilai logik, nilai etika, nilai estetika dan nilai teleologi.”

Berikut ini penulis akan jelaskan satu persatu tentang nilai-nilai kehidupan dalam implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan kinerja guru dalam disertasi ini, sebagai berikut:

1. Nilai Teologis

Nilai Teologis mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan berpusat pada keyakinan kepada Allah SWT, sebagaimana terkandung pada ajaran Islam mencakup iman, Islam, dengan ihsan.

Iman mencerminkan keyakinan kepada:

- a. Keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan beserta sifat-sifat-Nya.
- b. Keberadaan malaikat-malaikat Allah.
- c. Kitab-kitab suci diturunkan perlu Allah.
- d. Para nabi dengan rasul sebagai utusan Allah.
- e. Kepastian adanya hari kiamat.
- f. Ketentuan takdir (qada dengan qadar) baik maupun buruk.

Islam, sebagai praktik keimanan, memiliki lima rukun utama:

- a. Mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengakuan akan keesaan Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
- b. Melaksanakan salat lima waktu.
- c. Menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

- d. Berpuasa di bulan Ramadan.
- e. Menunaikan ibadah haji bagi mampu.

Ihsan memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- a. Hubungan dengan Allah, yaitu beribadah seolah-olah melihat-Nya, atau meyakini bahwa Allah selalu mengawasi.
- b. Hubungan dengan sesama makhluk, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan lingkungan sekitar.

Nilai teologis sudah tertanam pada diri manusia bahkan sebelum mereka diciptakan secara fisik, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-A'raf: 172 menegaskan bahwa setiap manusia telah bersaksi atas keesaan-Nya di alam ruh.

Ketika nilai teologis diterapkan pada kehidupan, ia memberikan ketenangan jiwa dengan raga bagi pemeluknya. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mampu menjadi dasar pada membentuk pola pikir dengan perilaku seorang Muslim berlandaskan kebenaran dengan hukum Islam. Proses pembelajaran pada perspektif teologis merupakan bentuk ikhtiar pada mengelola sekolah secara terencana dengan sistematis, guna menciptakan lingkungan pendidikan bercirikan Islam mampu melahirkan generasi berprestasi dengan meningkatkan kinerja sekolah selaras dengan ajaran-Nya.

2. Nilai Logik

Proses pembelajaran mampu dikategorikan sebagai nilai logik, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dengan mengingat. Nilai ini menjadi dasar pada bertindak dengan mengambil keputusan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali menyeru manusia menggunakan akalnya, seperti pada QS. Ali Imran: 190, menegaskan bahwa penciptaan alam semesta merupakan tanda bagi orang-orang berpikir.

Allah juga berfirman pada QS. An-Nahl: 67, menunjukkan bahwa pemanfaatan akal mampu membantu manusia membedakan antara bermanfaat dengan merugikan.

Berpikir secara logis harus terus berkembang identik dengan usia dengan tingkat kematangan seseorang. Jika bayi menggunakan naluri, anak-anak berpikir secara imitatif (meniru), maka orang dewasa harus mampu berpikir kreatif dengan inovatif, serta menghindari pola pikir egois. Dalam dunia pendidikan, nilai logik ini harus terus diterapkan perlu pemerintah maupun tenaga pendidik agar pengambilan keputusan pada sistem pendidikan selalu berbasis rasionalitas dengan manfaat.

Akal juga berperan pada membedakan antara benar dengan batil, serta memperkuat keimanan seseorang. Dalam QS. Ali Imran: 7, Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang berakal mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya.

Dalam Islam, akal memiliki kedudukan tinggi dengan sering dimanfaatkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pengajaran agama. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa Islam agama rasional mengedepankan pemikiran logis dengan argumentasi. Namun, pada pemikiran Islam, akal tetap berada di bawah wahyu. Akal digunakan memahami wahyu, bukan menentangnya. Oleh karena itu, pada Islam tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, melainkan keduanya saling melengkapi pada menjelaskan kebenaran.

3. Nilai Fisik/Fisiologi

Nilai fisiologis berkaitan dengan pemanfaatan fungsi fisik pada kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia merupakan ciptaan Allah memiliki manfaat besar, namun sering kali potensi ini tidak dimaksimalkan. Hal ini menyebabkan umat Islam tertinggal pada bidang sains dengan teknologi. Al-Maududi, seorang pembaharu Islam, mengkritik umat Islam tidak mengoptimalkan potensi diberikan Allah, seperti pendengaran (as-sam'), penglihatan (al-bashar), dengan hati (fuad). Dalam QS. An-Nahl: 78, Allah menjelaskan bahwa ketiga anugerah ini diberikan agar manusia bersyukur dengan menggunakannya kebaikan.

Dalam perspektif pendidikan, proses pembelajaran juga didasarkan pada nilai fisiologis. Islam mengajarkan umatnya menjaga

kesehatan dengan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Praktik seperti berwudhu, mandi janabah, serta penggunaan air pada bersuci menunjukkan bahwa Islam menekankan kebersihan fisik. Selain itu, ibadah puasa juga memberikan manfaat kesehatan dengan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, bekerja tanpa henti selama 11 bulan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat identik ajaran Islam, umat Muslim mampu lebih optimal pada menjalankan perannya, termasuk pada dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan proses pembelajaran tidak hanya melibatkan aspek spiritual dengan intelektual, tetapi juga aspek fisik, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan seimbang, sehat, dengan berkualitas.

4. Nilai Etik

Nilai etik mencakup sikap hormat, mampu dipercaya, serta keadilan, semuanya berhubungan erat dengan akhlak seseorang. Namun, pada realitas kehidupan saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan, baik perlu individu kurang berpendidikan maupun mereka memiliki latar belakang akademik tinggi. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan penting, sebagaimana ditegaskan pada Al-Qur'an bahwa Rasulullah suri teladan terbaik bagi umat manusia:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dengan (kedatangan) hari kiamat dengan Dia banyak menyebut Allah" (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan pada hadis bahwa beliau diutus menyempurnakan akhlak manusia:

"Saya diutus menyempurnakan budi pekerti (akhlak)." (Hadis Nabi)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jika tidak diiringi perlu nilai-nilai etika, maka kemajuan tersebut justru mampu menjadi ancaman bagi umat manusia. Hal ini terlihat pada berbagai kasus seperti

peperangan dengan eksploitasi lingkungan akibat pemanfaatan ilmu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam konteks pendidikan, proses pembelajaran menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu mengelola lembaga pendidikan secara efektif. Proses pembelajaran melalui prinsip-prinsip manajemen baik dengan berbasis nilai-nilai etika.

5. Nilai Estetika pada Pendidikan

Nilai estetika berkaitan dengan keindahan, keseimbangan, dengan keharmonisan, baik pada hubungan sosial maupun pada lingkungan sekitar. Allah menciptakan alam dengan segala keindahannya tidak hanya dimanfaatkan tetapi juga agar manusia mampu merasakan keteraturan dengan keseimbangan di dalamnya. Kasih sayang dengan keindahan merupakan bagian dari fitrah manusia dianugerahkan perlu Allah SWT, sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dengan merasa tenteram kepadanya, dengan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dengan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran, aspek estetika berperan penting, terutama pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan metode pembelajaran digunakan perlu para guru. Seorang pemimpin pendidikan perlu mencontoh seni kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan kelembutan pada berkomunikasi, berbicara dengan intonasi baik, serta membangun hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dengan

bermusyawaratlah dengan mereka pada urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

6. Nilai Teleologi pada Pendidikan

Nilai teleologi berorientasi pada manfaat, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dengan akuntabilitas pada setiap aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu diperintahkan atau dilarang memiliki hikmah dengan manfaat bagi manusia serta lingkungannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dengan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dengan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'."* (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sebaik-baik kamu orang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (Hadis Nabi)

Dalam pandangan materialisme, alam dianggap tidak memiliki sasaran tertentu karena diyakini ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Teori evolusi, misalnya, menganggap bahwa kehidupan berlangsung sebagai hasil seleksi alam. Namun, pada Islam, setiap ciptaan Allah memiliki sasaran telah ditetapkan-Nya. Seluruh unsur di alam semesta, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus dengan gajah, saling bergantung menciptakan keseimbangan ekosistem sempurna.

Konsep teleologi ini juga relevan pada konteks pendidikan, terutama pada proses pembelajaran bertujuan agar sistem pendidikan berjalan secara efisien, produktif, dengan memberikan manfaat lebih baik bagi peserta didik serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, MBM menjadi salah satu ikhtiar pada mewujudkan cita-cita pendidikan lebih maju dengan identik dengan kebijakan berlaku di Indonesia.

C. Landasan Teori/Konsep

1. Teori Manajemen dari GR. Terry

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predeternined ojectives through the efforts of otherpeople* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Manajemen suatu tahap melibatkan pengelolaan, pengaturan, dengan pemanfaatan sumber daya pada suatu organisasi. George R. Terry (1972:4) menyatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian tahap mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengendalian, dilakukan menentukan serta menca sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Griffin (2013) menambahkan bahwa manajemen mencakup serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dengan pengendalian diarahkan pada sumber daya organisasi—baik manusia, finansial, fisik, maupun informasi—guna menca sasaran secara efisien dengan efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menca sasaran tertentu. Dalam praktiknya, konsep manajemen sering dikaitkan dengan administrasi. E. Mulyasa (2007:19) menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan terkait hubungan antara manajemen dengan administrasi. Pertama, administrasi dianggap lebih luas daripada manajemen, di mana manajemen merupakan inti dari administrasi. Kedua, manajemen dianggap lebih luas daripada administrasi. Ketiga, manajemen dengan administrasi dipandang sebagai konsep identik.

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah manajemen tidak disebutkan secara eksplisit pada Al-Qur'an, konsepnya tercermin pada kata *yudabbiru* berarti mengarahkan, melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, serta menyusun rencana telah ditetapkan. Kata ini terdapat pada

beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Yunus (10:31), Q.S. Ar-Ra'd (13:2), dengan Q.S. As-Sajadah (32:5).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, manajemen mampu disimpulkan sebagai suatu tahap terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengawasan, dilakukan menca sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya secara efektif dengan efisien.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Hadiyanto (2004:63), MBS pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa tahap pendidikan tidak mampu berjalan optimal jika sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendidikan bukanlah sebuah tahap mekanis seperti di pabrik mampu beroperasi secara otomatis setelah program dijalankan. Sebaliknya, pendidikan melibatkan interaksi antara berbagai elemen input serta keterkaitan hasil pendidikan dengan lingkungan sekitarnya.

Secara etimologis, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *manajemen* diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara efektif menca sasaran; merujuk pada lembaga pendidikan tempat tahap belajar-mengajar berlangsung. Mampu dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya berpusat pada sekolah pada menjalankan tahap pembelajaran.

E. Mulyasa (2007:24) menjelaskan bahwa merupakan bagian dari reformasi pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pada manajemen memberikan kesempatan bagi sekolah mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dalam pendekatan, pola pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari sistem sepenuhnya dikendalikan perlu pemerintah pusat menuju sistem memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah itu sendiri. Nanang

Fatah (2003:8) menegaskan bahwa strategi bertujuan merancang ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan kepada kepala sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat—termasuk guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dengan masyarakat—pada upaya meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Sistem ini mengubah mekanisme pengambilan keputusan dengan mendistribusikan kewenangan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, model pengelolaan pendidikan memberikan sekolah otonomi lebih besar pada pengelolaannya. Pergeseran paradigma ini memungkinkan sekolah lebih mandiri pada mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya internal secara optimal, serta melibatkan seluruh elemen sekolah—termasuk kepala sekolah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dengan masyarakat—guna meningkatkan mutu pendidikan identik dengan kebijakan pendidikan nasional dengan regulasi berlaku.

Penerapan di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, sekolah masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi sekolah pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi memungkinkan sekolah menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala sekolah juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer sekolah.

Lebih jauh mendorong kepala dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, sekolah mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi MBM harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

Diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian mampu dibangun melalui berbagai strategi, seperti pengembangan unit usaha sekolah, kerja sama dengan pihak eksternal di bidang komersial, serta inisiatif lain mampu meningkatkan pendapatan dengan program pendidikan. Prinsip kemitraan mengacu pada kerja sama antara sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari kemitraan meningkatkan keterlibatan serta dukungan masyarakat pada bentuk moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan dijalin mampu disesuaikan dengan keperluan dengan kondisi sekolah, dengan memastikan bahwa kerja sama dibangun bersifat saling menguntungkan.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan

keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Melakukan perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan. Menurut Ahmad Rozikun dengan Namabuddin (2001:13), kesuksesan MBM memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis

sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar

menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada

pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran

speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber

belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Sejalan dengan pendapat A. Malik Fadjar (2002:37), keberhasilan bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah daerah, komite sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dengan peserta didik. Pengambilan keputusan secara kolektif di antara para pemangku kepentingan di tingkat sekolah menjadi faktor utama pada implementasi. Manajemen pendidikan diterapkan melalui MBM bertujuan memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksana utama pada tahap pembelajaran. Dengan pendekatan ini, sekolah diharapkan lebih mandiri, inovatif, serta mampu menciptakan iklim kompetitif sehat antar sekolah pada suatu wilayah. Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya orang tua dengan masyarakat, pada era otonomi ini turut berperan pada dewan sekolah.

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan dalam sistem pendidikan Indonesia yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Kurikulum ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk transformasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013. Peluncuran Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam proses belajar-mengajar agar lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Secara filosofis, Kurikulum Merdeka berpijak pada semangat merdeka belajar, yang berarti memberi kebebasan dan kemerdekaan bagi sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid serta konteks lokal masing-masing. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, tidak lagi terkungkung oleh batasan-batasan yang

kaku. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

Salah satu kekuatan utama dari Kurikulum Merdeka adalah fokusnya pada penguatan kompetensi esensial dan karakter peserta didik. Materi pelajaran disederhanakan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep-konsep penting, bukan sekadar menghafal informasi. Selain itu, kurikulum ini mendorong implementasi pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), di mana siswa terlibat dalam kegiatan nyata yang mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kerja sama tim. Proyek-proyek ini biasanya berkaitan dengan isu-isu kehidupan nyata di sekitar mereka, termasuk isu sosial, lingkungan, dan budaya lokal.

Lebih jauh, Kurikulum Merdeka menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai arah dan tujuan utama pendidikan. Enam dimensi dalam profil tersebut — beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif — menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa yang unggul. Hal ini mencerminkan upaya untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas dan siap berkontribusi di tengah masyarakat global.

Dalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam menyusun struktur kurikulum. Sekolah dapat memilih jalur implementasi secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing, baik melalui kurikulum nasional, kurikulum prototipe, maupun pengembangan kurikulum mandiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan besar kepada ekosistem pendidikan untuk berinovasi dan berkembang.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka bukan hanya perubahan teknis kurikulum, tetapi merupakan perubahan paradigma pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran, serta menjadikan guru sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang humanis, adaptif, dan transformatif.

Kompetensi ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Bertujuan meningkatkan keterlibatan kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan Program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi

sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-

masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Jadi, pengertian pembelajaran menurut para ahli adalah kunci untuk pengembangan pribadi, peningkatan keterampilan, dan kemajuan masyarakat. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana

komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah

mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika

diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas

dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala sekolah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang

diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain

keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Perlu semua pihak terlibat mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan

keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari

masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

3. Kinerja Guru

Kinerja guru merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Secara naratif, kinerja guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesungguhan seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melakukan penilaian, hingga membimbing peserta didik di dalam dan di luar kelas. Kinerja tersebut mencerminkan kualitas pelaksanaan peran guru

sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik secara pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Sementara itu, kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi ajar dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Kinerja guru yang baik juga tercermin dari kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan siswa, sesama guru, dan masyarakat, sebagai wujud dari kompetensi sosial dan kepribadian.

Guru yang memiliki kinerja tinggi biasanya mampu merancang pembelajaran dengan matang, misalnya dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang relevan dan kontekstual. Mereka juga mampu mengelola kelas secara efektif, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaannya, guru yang profesional akan menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Selain mengajar, kinerja guru juga diukur dari kemampuannya dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Guru harus mampu menyusun alat penilaian yang valid dan reliabel, menganalisis hasil belajar siswa, serta memberikan umpan balik yang membangun. Melalui proses ini, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran sekaligus merancang strategi perbaikan bagi siswa yang mengalami kesulitan.

Tidak kalah penting, kinerja guru juga mencakup keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan, seminar, atau diskusi ilmiah, serta keaktifannya dalam mendukung program-program sekolah. Guru yang memiliki dedikasi tinggi akan menunjukkan kepedulian

terhadap kemajuan siswa dan berperan aktif dalam membina lingkungan belajar yang kondusif.

Secara keseluruhan, kinerja guru bukan hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti jumlah jam mengajar, tetapi juga secara kualitatif melalui sejauh mana guru mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu, menyenangkan, dan berdampak positif terhadap perkembangan siswa. Oleh karena itu, peningkatan kinerja guru menjadi fokus utama dalam upaya reformasi pendidikan, termasuk dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang merdeka dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa melalui Profil Pelajar Pancasila.

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di lingkungan satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh aspek sekolah, baik dari segi manajerial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga membangun hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dijelaskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah serta pengembangan profesionalitas seluruh warga sekolah.

Peran kepala sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin instruksional (*instructional leader*), yaitu pemimpin yang mendorong inovasi pembelajaran, membina guru secara profesional, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Pengajaran di Indonesia sudah ada atau terjadi sejak zaman colonial. Bahasa asing adalah istilah yang digunakan pada jaman sekarang. Di Indonesia pada jaman kolonial, bahasa asing (seperti bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah, serta dan Jerman) telah diajarkan di sekolah-sekolah tertentu, dan diperuntukan bagi mereka berketurunan bangsawan dan anak-anak Belanda. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta

komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran

berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel,

dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamkan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada

menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator

dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi,

4. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat diterapkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan zaman, serta visi dan misi lembaga pendidikan.

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang berfokus pada bagaimana suatu kurikulum disusun, diterapkan, dan dievaluasi di satuan pendidikan. Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikelola secara profesional agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Manajemen kurikulum tidak hanya berbicara tentang

isi pelajaran atau struktur mata pelajaran semata, tetapi juga menyangkut strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, kegiatan pengayaan, hingga evaluasi hasil belajar peserta didik.

Pada tahap perencanaan, manajemen kurikulum dimulai dengan analisis kebutuhan, baik dari aspek peserta didik, lingkungan sosial, perkembangan IPTEK, maupun visi-misi sekolah. Dari sini, pihak sekolah – biasanya melalui tim kurikulum – menyusun dokumen kurikulum operasional yang mencakup struktur program, kalender akademik, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks ini, kepala sekolah dan guru berperan penting sebagai penggerak utama.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kurikulum, yaitu bagaimana guru mengimplementasikan rencana pembelajaran ke dalam praktik di kelas. Ini mencakup pemilihan metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, pengelolaan kelas, dan interaksi dengan siswa. Peran guru sangat dominan dalam tahapan ini karena merekalah yang berada di garda terdepan dalam menghadirkan kurikulum kepada peserta didik.

Setelah pelaksanaan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi kurikulum. Evaluasi ini dapat meliputi penilaian terhadap proses belajar, capaian hasil belajar siswa, efektivitas metode pembelajaran, serta masukan dari berbagai pihak, seperti guru, siswa, orang tua, dan pengawas sekolah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kurikulum secara berkelanjutan agar selalu relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Manajemen kurikulum juga mencakup koordinasi antar pihak sekolah, guru, orang tua, dan dinas pendidikan, terutama dalam konteks kebijakan kurikulum nasional, seperti implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut fleksibilitas dan inovasi dari masing-masing sekolah. Dalam hal ini, manajemen kurikulum menjadi semakin kompleks, karena melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip merdeka belajar, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter melalui *Profil Pelajar Pancasila*. Dengan demikian, manajemen kurikulum bukan sekadar administrasi

pendidikan, tetapi sebuah proses strategis dan dinamis yang memerlukan kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi agar kurikulum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa yang unggul.

Kompetensi kepala sekolah adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam mengelola satuan pendidikan. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan

orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan

pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Berkomunikasi pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik itu dua orang, tiga orang, empat orang, maupun secara berkelompok. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan

bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di sudah cukup jelas

dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus

mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

5. Kinerja Guru Sekolah Dasar

Kinerja guru sekolah dasar adalah hasil atau pencapaian kerja guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, pembimbing, dan pengelola pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Kinerja ini mencerminkan kualitas pelaksanaan tugas profesional guru dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan dasar peserta didik. Kinerja guru sekolah dasar merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan kualitas pendidikan, karena pada jenjang inilah fondasi karakter dan kemampuan akademik siswa mulai dibentuk. Guru di sekolah dasar tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai panutan, pembina karakter, dan pembimbing perkembangan sosial serta emosional anak.

Guru sekolah dasar menghadapi tantangan yang khas, mengingat siswa pada tahap ini berada dalam masa perkembangan awal yang sangat

dinamis. Oleh karena itu, kinerja guru sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami psikologi anak, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta menyampaikan materi ajar dengan pendekatan yang sederhana, konkret, dan kontekstual.

Kinerja guru sekolah dasar dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama adalah kemampuan merencanakan pembelajaran. Guru harus mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, serta menyesuaikannya dengan Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013. Perencanaan ini mencakup tujuan pembelajaran, metode, media, hingga penilaian yang akan digunakan.

Kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Guru yang berkinerja baik mampu mengelola kelas secara efektif, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti bermain sambil belajar, diskusi kelompok, eksperimen sederhana, hingga kegiatan berbasis proyek (*project-based learning*). Guru juga perlu mampu membangun interaksi yang positif, memberi motivasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Ketiga, guru harus melaksanakan penilaian secara objektif dan berkelanjutan. Mereka harus mampu mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar siswa, menginterpretasikan hasil belajar, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran.

Selain aspek pembelajaran, kinerja guru sekolah dasar juga meliputi keterlibatan dalam kegiatan sekolah seperti rapat dewan guru, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan profesional, dan hubungan dengan orang tua murid. Guru yang baik juga menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan semangat untuk terus belajar demi meningkatkan mutu pembelajaran.

Di era Kurikulum Merdeka, kinerja guru dituntut semakin adaptif dan kreatif. Guru tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai perancang pengalaman belajar yang bermakna, dengan memperhatikan minat dan kebutuhan siswa serta mengembangkan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, kinerja guru sekolah dasar bukan hanya diukur dari seberapa baik mereka mengajar, tetapi juga dari kontribusinya dalam

membentuk karakter anak, membangun budaya sekolah yang positif, serta kemampuannya berinovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan berorientasi pada masa depan anak.

Dinas Pendidikan adalah lembaga atau unit pelaksana teknis yang berada di bawah pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas ini merupakan representasi dari negara dalam mengelola dan mengawasi sistem pendidikan formal di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan nasional.

Dalam konteks manajemen pendidikan, Dinas Pendidikan memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah. Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada efektivitas dan integritas Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya.

Sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala sekolah,

mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial.

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen

pendidikan. Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar.

D. Landasan Kebijakan dan Perundang-Undangan

Penelitian ini didasarkan pada berbagai kebijakan nasional dan regulasi pendidikan yang menjadi pijakan legal dan normatif dalam pengembangan serta implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam konteks peningkatan kinerja guru sekolah dasar. Landasan kebijakan ini penting karena memberikan arah, kerangka hukum, serta legitimasi terhadap praktik manajemen kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum Merdeka lahir sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut, dengan penekanan pada pengembangan kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, serta kebebasan belajar.

Selain itu, Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini menjadi dasar legitimasi bagi sekolah untuk menerapkan

manajemen kurikulum secara kontekstual, fleksibel, dan adaptif seperti yang ditawarkan dalam Kurikulum Merdeka.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU ini secara eksplisit menegaskan peran strategis guru sebagai pendidik profesional. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran guru tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang dan pengembang pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

UU ini juga mengamanatkan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan supervisi pendidikan, yang semuanya erat kaitannya dengan manajemen kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, manajemen Kurikulum Merdeka harus diarahkan pada penguatan profesionalitas guru agar mampu memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (dan perubahannya PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015)

Regulasi ini menetapkan delapan standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan, yang menjadi dasar pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Dalam Kurikulum Merdeka, standar nasional pendidikan dijadikan acuan minimum, sementara sekolah diberi keleluasaan dalam mengembangkan implementasi kurikulum sesuai konteksnya.

Manajemen kurikulum harus memastikan bahwa proses pembelajaran tetap mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah, namun dengan strategi yang inovatif dan kontekstual. Penelitian ini menyoroti bagaimana pihak sekolah mengelola Kurikulum Merdeka agar tetap sesuai dengan standar nasional dan sekaligus mampu meningkatkan kinerja guru.

4. Permendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

Kebijakan ini merupakan dasar legal penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendorong pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan berpusat pada peserta didik melalui penguatan karakter dan kompetensi. Sekolah diberi pilihan untuk menggunakan Kurikulum Merdeka secara bertahap melalui tiga jalur: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.

Penelitian ini menelaah bagaimana sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanjung Priok mengelola perubahan kurikulum tersebut, baik dari sisi strategi implementasi, kesiapan guru, hingga pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja tenaga pendidik.

5. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Regulasi ini menetapkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru, yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru menjadi fokus utama agar pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen formatif dapat diterapkan dengan baik.

Manajemen kurikulum yang efektif harus memfasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan internal, supervisi pembelajaran, serta kolaborasi dalam komunitas belajar guru (CPG/Komunitas Praktisi). Penelitian ini mengkaji bagaimana proses manajerial tersebut berjalan dan berkontribusi terhadap kinerja guru secara nyata.

Seluruh kebijakan dan perundang-undangan di atas menjadi dasar legal dan operasional yang memperkuat urgensi serta relevansi dari penelitian ini. Manajemen Kurikulum Merdeka bukanlah proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Oleh karena

itu, penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik manajerial sekolah secara nyata dan kontekstual.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian mengemukakan tentang merdeka belajar dalam kaitan dengan peran guru.

1. Disertasi yang ditulis oleh Nurmayani dengan judul Implementasi Kurikulum Dalam Meningkatkan Lulusan Di Pesantren Ar-Raudlatulhasanah Medan Sumatera Utara pada tahun 2017, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pembinaan kemampuan guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum yang berdampak pada pembelajaran yang baik. Guru perlu dilatih dalam menyusun perangkat pembelajaran (Nurmayani, 2017).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novrita Nuryani pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak SMAN 10 Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka sudah diimplementasikan namun masih beberapa kendala. Hasil penelitian adanya penghambat dari implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak SMAN 10 Kota Jambi yakni kurangnya referensi terutama buku paket dan buku penunjang yang terkait dengan kurikulum merdeka, kurangnya pengalaman tenaga pengajar (guru) dalam menerapkan pembelajaran berdeferensiasi dan masih ada guru yang minset atau cara berpikir tidak berubah, masih ada guru yang mempertahankan gaya mengajar yang tidak memerdekakan siswa (Suryani, 2022).
3. Penelitian Dhani (2020) mengemukakan peran guru dalam mengembangkan kurikulum merdeka belajar yaitu (1) merumuskan tujuan spesifik pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum dan karakteristik mata pelajaran dan siswa serta keadaan kelas; (2) mendesain proses pembelajaran yang secara efektif dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan; (3) melaksanakan proses pembelajaran sebagai implementasi kurikulum; (4). melaksanakan evaluasi

proses dan hasil pembelajaran; (5) melaksanakan evaluasi terhadap interaksi komponen-komponen kurikulum yang telah diimplementasikan (Dhani, 2020).

4. Selanjutnya, penelitian Yamin & Syahrir (2020) mengungkapkan bahwa guru menjalankan perannya dalam merdeka belajar dengan mendesain strategi atau metode pembelajaran berbasis merdeka belajar. Karena merdeka belajar merupakan respon terhadap revolusi industri 4.0 maka tugas guru adalah mendesain pembelajaran dengan strategi implementasi yang relevan untuk memfasilitasi siswa mencapai kemampuan atau keterampilan terhadap literasi baru yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia (Yamin & Syahrir, 2020).
5. Penelitian yang ditulis Susanty (2020) menyatakan peran guru dalam implementasi peran guru dalam pembelajaran dari masa pandemic Covid-19 yaitu melakukan inovasi terhadap pembelajaran, terutama inovasi yang berkaitan dengan model pembelajaran, media pembelajaran. Inovasi ini penting dilakukan oleh guru agar merdeka belajar dapat diimplementasikan melalui pembelajaran daring yang banyak digunakan dalam masa pandemi Covid-19. dalam melaksanakan inovasi pembelajaran tersebut (Susanty, 2020).
6. Penelitian Mahmudah (2021) mengungkapkan bahwa guru harus melakukan self innovation berkaitan dengan merdeka belajar dalam kondisi di masa pandemi Covid-19. Self innovation guru tersebut dikaitkan dengan inovasi desain materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran daring, dan penilaian hasil belajar siswa (Mahmudah, 2021).
7. Maromy (2018) yang berjudul *Pengaruh Manajemen Kurikulum dan Komitmen Guru terhadap Kinerja Mengajar Guru SD Negeri di Kota Bandung*. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kurikulum berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, terutama ketika dikombinasikan dengan tingkat komitmen profesional guru. Penelitian disertasi ini menjadi berbeda karena memfokuskan pada Kurikulum Merdeka

dan menggunakan kerangka manajerial klasik untuk mengevaluasi proses implementasi kurikulum sebagai dasar peningkatan kinerja guru.

8. Rambe et al. (2023) dalam kajiannya berjudul *Optimalisasi Kinerja Guru pada Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 066430 Medan*, menekankan bahwa peningkatan kinerja guru terjadi melalui pelatihan internal dan pendampingan kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada praktik-praktik pendampingan guru. Persamaan utama terletak pada konteks implementasi Kurikulum Merdeka dan jenjang sekolah dasar negeri. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak hanya melihat upaya pembinaan teknis, tetapi mengkaji keseluruhan proses manajemen kurikulum berdasarkan teori GR Terry, yang juga dibandingkan dengan kerangka regulasi formal, seperti *Permendikbudristek No. 262/M/2022* dan *PP No. 19 Tahun 2017* sebagai dasar kesenjangan empiris dan normatif dalam implementasi di sekolah.
9. Nofrianni et al. (2024) dalam penelitiannya *Analisis Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SD*, lebih banyak menyoroti tingkat kesiapan guru dalam menghadapi Kurikulum Merdeka, terutama dalam menyusun modul ajar, merancang asesmen, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan guru sangat dipengaruhi oleh faktor pelatihan dan penguasaan teknologi. Meskipun penelitian ini menunjukkan relevansi konteks dan subjek yang sama, yaitu guru sekolah dasar dan Kurikulum Merdeka, namun tidak membahas aspek manajemen institusional secara sistematis. Di sinilah letak keunikan penelitian ini, yang tidak hanya menyoroti kesiapan guru, tetapi menjadikan manajemen kurikulum sebagai sistem penyebab utama yang dapat membentuk kesiapan dan meningkatkan kinerja guru.
10. Mayangsari et al. (2024) dalam karya berjudul *Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala utama dalam implementasi kurikulum baru meliputi kurangnya pelatihan, pemahaman asesmen formatif yang minim, dan ketidaksiapan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Fokus penelitian

ini berada pada tingkat teknis dan individual guru, sehingga belum menjangkau aspek manajerial yang bersifat sistemik. Dalam hal ini, penelitian disertasi ini memberikan kontribusi yang berbeda, yaitu dengan menyediakan pendekatan manajerial menyeluruh dalam merespons kendala tersebut, bukan hanya dengan pelatihan guru, tetapi melalui sistem pengelolaan kurikulum di tingkat institusi pendidikan dasar.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dikaji oleh peneliti belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki kebaruan berupa gagasan dan pemikiran mengenai ketercapaian implementasi kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar dan implikasinya terhadap kinerja guru. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan teori manajemen GR Terry dengan konteks implementasi Kurikulum Merdeka dan menganalisisnya dalam kerangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty dalam tiga aspek utama: (1) penggunaan teori GR Terry untuk mengevaluasi manajemen kurikulum secara sistemik; (2) fokus pada kinerja guru sebagai outcome dari proses manajerial, bukan sekadar faktor internal guru; dan (3) eksplorasi kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dan amanat regulasi formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap manajemen pendidikan dasar dalam kerangka implementasi Kurikulum Merdeka.